## Mengapa PM Australia Menangis, Referendum Apa Penyebabnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dilaporkan beberapa kali terisak seakan menangis. Ini terjadi saat ia memaparkan pidato di Gedung Palemen, Kamis (23/3/2023) waktu setempat. Hal ini terkait referendum yang akan dilakukan, perdana dalam 24 tahun. Referendum itu terkait suku Aborigin dan orang kepulauan Selat Torres. Ada apa? Ini menyangkut pengakuan kepada penduduk asli Australia itu di dalam konstitusi negara kangguru tersebut. Sehingga mereka memiliki hak suara. "Undang-undang yang diusulkan untuk mengubah konstitusi untuk mengakui bangsa pertama Australia ... Apakah Anda menyetujui perubahan yang diusulkan ini?," ujarnya, dikutip dari CNN International . "Itulah pertanyaan di hadapan rakyat Australia, tidak lebih, tetapi tidak kurang," tambahnya sedikit emosional, seraya berhenti sejenak. "Momen ini dibuat dalam waktu yang sangat lama, namun mereka (Aborigin dan orang kepulauan Selat Torres) telah menunjukkan kesabaran dan optimisme yang luar biasa melalui proses ini," ujarnya lagi. "Dan semangat kerja sama serta dialog yang bijaksana dan penuh hormat itu sangat penting untuk mencapai titik ini dengan cara yang bersatu," kata Albanese. Referendum sendiri akan dijadwalkan antara Oktober dan Desember. Pemerintah mengatakan ini adalah kesempatan terbaik negara untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, yang dilakukan setelah penjajahan. Dalam laporan yang sama, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres Sudan 200 tahun menyaksikan invasi di tanah mereka. Namun, dari data statistik pemerintah, kesenjangan masih terjadi. Warqa pribumi itu masih mendapatkan penderitaan di bidang kesehatan. Belum lagi hasil ekonomi mereka lebih buruk daripada anggota populasi Australia non-Pribumi. Bahkan, Aborigin dan Torres tidak pernah disebutkan dalam konstitusi negara itu yang sudah berusia 122 tahun. Padahal, jumlah mereka sekitar 3,2% dari sekitar 26 juta populasi Australia. Diketahui, untuk lolos, referendum harus memenangkan mayoritas suara secara nasional dan mayoritas suara di sebagian besar negara bagian. Dalam sejarahnya, hanya delapan dari 44 referendum yang pernah disetujui di Australia. Referendum terakhir diadakan pada tahun 1999. Ketika itu, warga Australia menolak seruan untuk menjadi negara republik. Albanese mengatakan kata-kata pemungutan suara tahun ini

dirancang selama berbulan-bulan. Pemerintah sudah konsultasi dengan kelompok adat dan pakar hukum. "Bentuk kata-kata ini benar secara hukum, dan ini adalah bentuk kata-kata yang kita semua yakini akan mendapatkan dukungan sekuat mungkin dari masyarakat Australia," katanya lagi.